

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA 16 KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S-1) di
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

PRAYUDI ANGGIA

NIM : 2007 / 84965

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2012

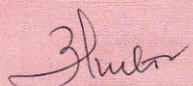
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA 16 KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI
SUMATERA BARAT

Nama : Prayudi Anggia
TM/NIM : 2007/84965
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2012

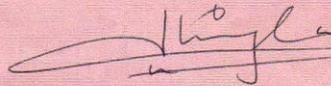
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



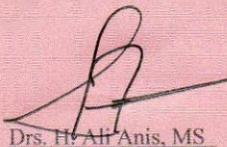
Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS
NIP. 19610502 198601 2 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS
NIP. 19491215 197703 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN, SKRIPSI

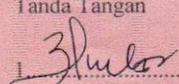
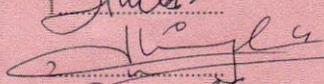
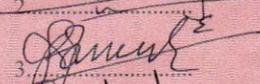
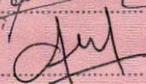
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Negeri Padang*

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA 16 KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI
SUMATERA BARAT

Nama : Prayudi Anggia
TM/NIM : 2007/84965
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2012

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS	1. 
2. Sekretaris	: Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS	2. 
3. Anggota	: Drs. Akhirmen, M.Si	3. 
4. Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prayudi Anggia
NIM/Thn Masuk : 84965 / 2007
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Elang I Gg I, Air Tawar Barat, Padang
No Telp / HP : - / 085263569772
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 16 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang dan perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran sendiri tanpa bantuan dari orang lain secara penuh melainkan bimbingan dan arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini akan sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan saya buat ini dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku, serta sanksinya sesuai dengan norma yang berlaku sesuai di perguruan tinggi.

Padang, 31 Juli 2012
Yang menyatakan,



Prayudi Anggia
2007. 84965

ABSTRAK

Prayudi Anggia, (2007/84965): Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 16 Kabupaten/kota Di Propinsi Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS dan Ibuk Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh pajak mobil terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, (2) Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota, (3) Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota, (4) Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota, (5) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota, (6) pengaruh pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu kombinasi 16 dari 19 Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2008 sampai 2010, dengan menggunakan pendekatan **Random Effect(REM)**. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup. (1) Analisis regresi panel. (2) Uji t. (3) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pajak mobil berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota ($\text{Prob} = 0,000 < \alpha = 0,05$) dengan besar pengaruhnya 0,285 persen. (2) retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota ($\text{Prob} = 0,000 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,363 persen. (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota ($\text{Prob} = 0,000 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,318 persen. (4) jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota ($\text{Prob} = 0,472 > \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,051 persen. (5) pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota ($\text{Prob} = 0,5978 > \alpha = 0,05$) (6) Pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat ($\text{Prob} = 0,000 < \alpha = 0,05$). Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 91,4 persen.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggali sumber-sumber penerimaan daerah tanpa merusak tataran ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengalokasikan peningkatan pendapatan asli daerah, dengan cara melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 16 Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS dan Ibuk Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS, Ibuk Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS, Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan Ibuk Ariusni, SE, M.Si. selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, MS selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing selama belajar di Fakultas Ekonomi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk

kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.

7. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta beserta Kakak dan Adik yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2007.
10. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2012

Penulis
Prayudi Anggia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.	16
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	18
1. Konsep Keuangan Daerah	18
2. Pendapatan Asli Daerah	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD	22
a. Pengaruh Penerimaan Pajak Mobil Terhadap PAD	22
b. Pengaruh Retribusi Terhadap PAD.....	26
c. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD.....	28
d. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD.....	29
e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PAD.....	31

B. Penelitian Sejenis	35
C. Kerangka Konseptual	36
D. Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Variabel Penelitian.....	42
F. Defenisi Operasional	43
G. Teknik Analisis	44
1. Analisis Deskriptif	44
2. Analisis Induktif	44
a. Model Regresi Panel	44
3. Uji Persaratan Analisis.....	48
Uji Asumsi Klasik.....	48
Koefisien Determinasi (R ²)	49
Pengujian Hipotesis.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian).....	53
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	53
a. Letak Geografis Sumatera Barat	53

b. Iklim	54
c. Ketenagakerjaan	55
d. Pendidikan	56
2. Deskripsi Variabel Penelitian	56
a. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah 16 dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat	56
b. Deskripsi Pajak Mobil	60
c. Deskripsi Retribusi Daerah	62
d. Deskripsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	64
e. Deskripsi Jumlah Penduduk	67
f. Deskripsi pertumbuhan Ekonomi	70
3. Analisis Induktif	73
a. Uji Asumsi Klasik	73
b. Analisis Model Regresi Panel	76
c. Koefisien Determinasi (R^2)	82
d. Pengujian Hipotesis	83
1. Uji T	83
2. Uji F	87
B. Pembahasan	88
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Barat	5
2. Perkembangan Penerimaan Pajak Mobil	7
3. Retribusi Daerah di Propinsi Sumatera Barat	9
4. Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah di Propinsi Sumatera Barat..... ..	11
5. Jumlah Penduduk di Propinsi Sumatera Barat	13
6. Nilai PDRB menurut Harga Konstan 2000 di Propinsi Sumatera Barat....	14
7. Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Barat.....	58
8. Penerimaan Pajak Mobil	61
9. Retribusi Daerah di Propinsi Sumatera Barat	63
10. Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah di Propinsi Sumatera Barat.....	66
11. Jumlah Penduduk di Propinsi Sumatera Barat	69
12. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi	71
13. Hasl Uji Multikoloneritas.....	73
14. Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas	75
15. Hasil Uji Chow Test.....	76
16. Hasil Uji Hausman	77
17. Hasil Estimasi Regresi Panel	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat	38

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Data Mentah yang Diolah.....	104
2. Hasil Uji Multikolinearitas	106
3. Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas.....	111
4. Hasil Uji Chow	112
5. Hasil Uji Husman	112
6. Hasil Uji Regresi Panel.....	113
7. Tabel T.....	114
8. Tabel F.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha untuk mengadakan suatu perubahan dan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Dimana pembangunan daerah juga merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moral maupun materil. Tujuan pembangunan yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada Januari 2001 yang lalu merupakan awal bagi daerah untuk memulai mengkonsentrasikan diri terhadap pembangunan daerahnya. Pelaksanaan pembangunan setiap daerah pada saat sekarang ini sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan yang dapat dikumpulkan dari daerah itu sendiri. Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitikberatkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah.

Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak

mampu berkembang secara mamadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri. Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 32 tahun 2004 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber keuangan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 adalah terdiri dari pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan, maka pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar tiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat

menggali setiap potensi yang ada di daerahnya, baik itu potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun potensi Sumber Daya Alam (SDA) semaksimal mungkin. Selain itu pemerintah dituntut untuk adil dalam menentukan proses pembangunan. Nilai keadilan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dimaknai dengan adanya kesamaan jumlah barang dan jumlah jasa yang didapat, memiliki utilitas yang sesuai dengan masing-masing usaha yang mencapai kepuasan maksimum masing-masing warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengelolaan daerah lebih di titik beratkan pada daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Daerah Propinsi adalah Daerah otonom sekaligus daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Propinsi bukan merupakan daerah atasan kabupaten atau daerah kota. Jadi antara daerah otonom propinsi dengan daerah otonom kabupaten atau daerah otonom kota tidak memiliki hubungan yang hierarki.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD

suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang semakin meningkat akan mendorong kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih mempermudah pembangunan di daerah perlu kiranya ditetapkan prioritas pembangunan dan kebijakan-kebijakan tentang prioritas pembangunan dan kebijakan tentang anggaran. Karena kebijakan ini akan membantu pemerintah daerah untuk menentukan target pembangunan yang dilaksanakan.

Demikian juga kebijakan mengenai anggaran akan membantu pemerintah daerah dalam mengontrol masalah keuangan daerah dan sebagai alat untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. selain itu untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah sendiri, maka diperlukan kebijakan daerah melalui penetapan peraturan daerah. sehingga tujuan akhir pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ekonomi dapat tercapai.

Realisasi penerimaan PAD Propinsi Sumatera Barat selama periode 2008 hingga 2010 terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 509 miliar pada tahun 2008 meningkat menjadi 582 miliar pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya, berikut

perkembangan penerimaan PAD Pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dapat kita lihat pada Tabel 1

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010

No	Kabupaten/Kota	2008 (Rp)Ribu	2009 (Rp)Ribu	2010 (Rp)Ribu	LP Rata-Rata (%)
1	Kep. Mentawai	25,243,861	29,188,166	21,601,256	-9.75
2	Pesisir Selatan	16,377,994	17,514,448	22,480,000	14.51
3	Solok	18,373,100	19,806,290	20,636,775	5.91
4	Sijunjung	24,423,791	25,982,270	22,602,390	-4.29
5	Tanah Datar	32,084,222	36,543,147	35,402,173	5.34
6	Padang Pariaman	23,813,876	22,880,889	23,800,000	-0.03
7	Agam	24,180,990	25,956,304	25,000,001	1.76
8	50 Kota	20,738,935	11,307,396	23,959,538	3.66
9	Pasaman	16,265,565	15,721,240	17,696,418	2.81
10	Solok Selatan	12,008,338	11,989,380	15,590,603	15.04
11	Dharmasraya	21,562,523	25,120,058	54,670,101	35.28
12	Pasaman Barat	19,755,964	23,457,517	28,067,830	17.58
13	Padang	117,728,886	113,318,411	124,252,134	2.53
14	Solok	21,644,596	23,831,125	16,912,151	-15.40
15	Sawah Lunto	23,441,989	26,532,986	28,054,771	9.31
16	Padang Panjang	13,457,506	22,581,303	22,176,271	32.99
17	Bukittinggi	33,828,542	38,891,935	35,140,170	2.15
18	Payakumbuh	31,491,006	32,555,381	34,516,671	4.53
19	Pariaman	13,341,784	12,263,181	10,030,480	-15.17
	Sumatera Barat	509,763,468	535,441,427	582,589,733	6.57

Sumber : BPS Sumbar 2008-2010 (data diolah 2012)

Pada Tabel 1 dapat dilihat peningkatan PAD pada Propinsi Sumatera Barat secara total dengan laju pertumbuhan 6,57%. Penurunan tingkat PAD terjadi di beberapa kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Penurunan laju pertumbuhan terbesar diantaranya terjadi di Kabupaten Solok dan Kota Pariaman yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata lebih dari (-15%), hal ini terjadi kemungkinan karena berkurangnya penerimaan dari beberapa sektor yang

menyokong peningkatan PAD ditambah lagi kota pariaman merupakan daerah yang mengalami dampak terburuk dari musibah gempa yang terjadi pada tahun 2009, hal ini kemungkinan berpengaruh besar terhadap penerimaan PAD di kota ini.

Sebaliknya peningkatan laju pertumbuhan yang pesat terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kota Padang Panjang. Laju pertumbuhan rata-rata Kanbupaten Dharmasraya dan Kota Padang Panjang berturut-turut sebesar 35,28% dan 32,99%, peningkatan laju pertumbuhan yang besar ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan sumber-sumber PAD seperti pajak dan retribusi daerah. Terutama di Kota Padang Panjang apalagi semenjak didirikannya tempat rekreasi Mifan yang mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat Propinsi Sumatera Barat bahkan masyarakat Propinsi Riau yang berkunjung kedaerah ini yang kemungkinan berpengaruh besar pada peningkatan Pajak dan Retribusi daerah Kota Padang Panjang.

Sesuai dengan Undang-undang no 33 tahun 2004 pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan asli daerah. Pajak mobil termasuk didalam pajak daerah tersebut. Pada Tabel 2 disajikan data penerimaan pajak mobil pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Tabel 2
Data Perkembangan Penerimaan Pajak Mobil Pada Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Dan 2010

No	Kabupaten/Kota	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	LP Rata-Rata (%)
Kabupaten					
1	Pesisir Selatan	2.536.853.850	2.974.578.700	3.457.844.975	16,75
2	Solok	2.357.837.894	2.995.366.800	3.296.434.120	18,54
3	Sijunjung	2.390.907.129	2.756.189.775	3.026.725.850	12,55
4	Tanah Datar	4.170.580.345	4.659.459.000	4.983.401.725	9,34
5	Agam	2.204.700.400	2.705.137.575	3.041.319.625	17,56
6	50 Kota	2.979.986.235	3.590.344.862	3.814.948.548	13,37
7	Pasaman	1.727.262.010	1.941.860.195	2.151.666.175	11,61
8	Solok Selatan	968.273.225	1.242.521.850	1.349.086.495	18,45
9	Dharmasraya	4.124.916.908	4.992.199.580	5.433.295.977	14,93
10	Pasaman Barat	2.568.529.625	3.409.839.845	3.926.448.725	23,95
Kota					
11	Padang	61.101.190.410	73.925.196.492	83.590.550.930	17,03
12	Solok (Kota)	4.014.696.956	4.458.800.155	5.023.503.500	11,86
13	Sawah Lunto	1.927.796.850	2.270.400.975	2.413.221.500	12,03
14	Padang Panjang	2.224.779.500	2.481.926.400	2.744.031.450	11,06
15	Bukittinggi	11.036.434.825	12.229.878.725	12.995.543.230	8,54
16	Payakumbuh	6.085.229.998	7.052.420.420	7.783.298.875	13,13
17	Pariaman	4.484.481.675	4.789.815.550	5.677.697.445	12,67
Sumatera Barat		116.904.457.835	138.475.936.899	154.709.019.145	15,09

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat 2008-2010 (Data Diolah 2012)

Dari Tabel 2 dapat dilihat kenaikan jumlah penerimaan pajak mobil dari tahun ke tahun di Propinsi Sumatera Barat. Kenaikan signifikan terlihat antara tahun 2008 sampai tahun 2010. Terlihat pada tahun 2008 jumlah penerimaan Pajak untuk mobil adalah Rp.116.904.457.835 dan tahun 2010 meningkat menjadi

Rp.154.709.019.145 itu artinya rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak mobil dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mencapai 15,09%.

Laju pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak mobil terbesar terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 23,95%, dengan jumlah penerimaan Rp.2.568.529.625 pada tahun 2008 dan Rp.3.926.448.725 pada tahun 2010. Kenaikan dalam penerimaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh semakin meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Laju pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak mobil terendah terjadi di Kota Bukittinggi. Rata-rata laju pertumbuhan Kota Bukittinggi sebesar 8,57% dengan jumlah penerimaan Rp.11.036.434.825 pada tahun 2008 menjadi Rp.12.229.878.725 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.12.995.543.230. Rendahnya perkembangan penerimaan pajak mobil di Kota Bukittinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah mobil yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun yang sama yang mengalami pertumbuhan yang kecil dan mempengaruhi peningkatan jumlah wajib pajak.

Selanjutnya retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Pada Tabel 3 disajikan data retribusi daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat

Tabel 3
Retribusi Daerah Pada Kabupaten/Kota
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010

No	Kabupaten/Kota	2008 (Rp) Ribu	2009 (Rp) Ribu	2010 (Rp) Ribu	LP Rata-Rata (%)
1	Kep. Mentawai	-	-	-	-
2	Pesisir Selatan	3,822,704	3,762,782	5,752,500	25.66
3	Solok	4,348,146	3,839,764	6,054,829	23.00
4	Sijunjung	4,601,478	4,229,506	3,749,749	-9.71
5	Tanah Datar	4,474,972	2,785,393	3,720,802	-2.09
6	Padang Pariaman	1,725,399	2,266,281	3,575,000	33.98
7	Agam	5,304,039	6,038,728	9,474,849	35.38
8	50 Kota	4,385,466	3,449,075	7,493,932	47.96
9	Pasaman	3,011,985	3,501,395	4,339,197	20.09
10	Solok Selatan	1,242,088	1,559,039	4,898,481	119.86
11	Dharmasraya	3,476,703	6,906,584	13,779,021	99.08
12	Pasaman Barat	4,212,261	5,883,822	6,637,214	25.52
13	Padang	24,793,292	21,898,305	26,394,268	4.43
14	Solok	3,059,285	2,633,617	3,658,054	12.49
15	Sawah Lunto	13,661,889	13,891,964	13,876,921	0.79
16	Padang Panjang	4,261,024	11,940,450	12,599,260	92.87
17	Bukittinggi	9,851,572	11,048,263	9,812,166	0.48
18	Payakumbuh	7,032,684	6,456,756	6,829,029	-1.21
19	Pariaman	1,276,232	1,433,899	1,523,480	9.30
	Sumatera Barat	104,544,153	115,826,837	144,168,752	15.23

Sumber : BPS Sumbar 2008-2010 (data diolah 2012)

Pada Tabel 3 dapat dilihat perkembangan Retribusi di Propinsi Sumatera Barat. Dimana tingkat laju pertumbuhan propinsi mencapai 15.23%. Sedangkan penerimaan retribusi untuk Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2008 sebesar Rp.104,5 milyar menjadi Rp 144,1 milyar pada tahun 2010. Dilihat dari laju pertumbuhan setiap kabupaten/kota, maka terlihat terjadi perkembangan dan penurunan jumlah penerimaan laju pertumbuhan retribusi untuk setiap daerahnya. Penurunan tingkat penerimaan retribusi terjadi di Kabupaten Sijunjung dari laju pertumbuhan rata-rata yang mencapai (--9.71)%. Hal ini kemungkinan karena

kurangnya peningkatan prasana yang mendukung pemungutan retribusi di daerah ini, pertumbuhan yang buruk untuk retribusi daerah untuk kabupaten sijunjung terlihat tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini kemungkinan karena meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dari sumber pendapatan daerah yang lain.

Selanjutnya laju pertumbuhan yang besar terjadi di beberapa Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. diantaranya terjadi pada kabupaten solok selatan dan kabupaten Dharmasraya, yaitu berturut-turut sebesar 119.86% dan 99.08%. Hal ini terjadi kemungkinan karena kedua kabupaten ini merupakan kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari kabupaten yang ada sebelumnya. Sehingga terjadi banyak pembangunan sarana dan prasarana penunjang peningkatan perekonomian masyarakat, dimana nantinya mempengaruhi peningkatan retribusi daerah ini.

Sesuai dengan Undang-undang no 33 tahun 2004. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu dari empat sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan disajikan data hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat yang di rangkum pada Tabel 4 .

Tabel 4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2010

No	Kabupaten/Kota	2008 (Rp)Ribu	2009 (Rp)Ribu	2010 (Rp)Ribu	LP Rata-Rata (%)
1	Kepulauan Mentawai	7,745,156	8,305,891	7,717,621	-0.19
2	Pesisir Selatan	1,718,642	2,146,892	2,950,000	31.16
3	Solok	2,414,781	2,532,926	2,573,173	3.24
4	Sijunjung	3,562,220	4,637,762	4,400,000	12.53
5	Tanah Datar	9,021,295	3,404,091	10,796,501	77.45
6	Padang Pariaman	1,958,643	2,266,281	2,500,000	12.53
7	Agam	2,557,454	3,062,021	2,000,000	-7.48
8	50 Kota	1,747,706	1,783,654	1,741,028	-0.17
9	Pasaman	1,991,374	2,710,209	2,710,209	18.05
10	Solok Selatan	2,220,110	2,893,415	3,104,663	18.81
11	Dharmasraya	2,600,214	2,736,035	3,000,000	7.44
12	Pasaman Barat				
13	Padang	3,788,864	4,741,733	4,700,000	12.13
14	Solok	2,446,070	3,347,637	3,434,298	19.72
15	Sawah Lunto	2,835,566	3,036,898	3,320,000	8.21
16	Padang Panjang	1,597,438	1,986,512	2,014,511	12.88
17	Bukittinggi	1,084,306	1,374,582	1,211,000	7.44
18	Payakumbuh	3,497,296	3,973,757	3,623,757	2.41
19	Pariaman	1,785,518	2,139,082	2,100,000	8.99
	Sumatera Barat	54,572,653	57,079,378	63,896,761	12.90

Sumber : BPS Sumbar 2008-2010 (data diolah 2012)

Pada Tabel 4 dapat dilihat perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Menurut Kabupaten/Kota. Apabila dilihat dari pertumbuhan Propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan terjadi peningkatan laju pertumbuhan yang cukup besar. Dilihat dari rata-rata propinsi mencapai 12.90% dimana pendapatan pada tahun 2008 untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.54,572,653 meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp.57,079,378 dan pada tahun 2010 menjadi Rp.63,896,761.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata untuk kabupaten/kota, terlihat bahwa Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten dengan tingkat laju pertumbuhan terbesar yaitu mencapai 77.45 %. Peningkatan ini terjadi kemungkinan karena keberhasilan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang membantu dalam peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah ini.

Laju pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada kabupaten agam dimana laju pertumbuhan rata-rata daerah ini yaitu (-7,48)%. Hal ini terjadi kemungkinan karena turunnya laba dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Bicara tentang pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan penduduk. karena pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi. Pada Tabel 5 disajikan data jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dari Tabel 5 dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk untuk Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2008. Dimana jumlah penduduk untuk Propinsi Sumatera Barat 4.763.099 jiwa meningkat menjadi 4.846.909 jiwa ditahun 2010. Laju pertumbuhan rata-rata propinsi sebesar 0.88% tiap tahunnya. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota terlihat laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Laju pertumbuhan Kabupaten Solok Selatan rata-rata

8,36%. Kemungkinan laju pertumbuhan yang besar ini terjadi karena jumlah imigrasi yang besar di Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan laju pertumbuhan mengalami defisit terjadi di Kota Padang Panjang yang mencapai 7,99%. Hal ini terjadi kemungkinan karena emigrasi yang terjadi di Kota Padang Panjang.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010

No	Kabupaten/Kota	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)	2010 (Jiwa)	LP Rata-Rata (%)
1	Kepulauan Mentawai	68907	68964	76173	4.77
2	Pesisir Selatan	442257	448488	429246	-1.54
3	Solok	355705	359819	348566	-1.04
4	Sijunjung	202275	206982	201823	-0.11
5	Tanah Datar	335926	336604	338494	0.38
6	Padang Pariaman	387195	389735	391056	0.50
7	Agam	429822	431153	454853	2.76
8	50 Kota	331771	333921	348555	2.42
9	Pasaman	257374	261579	253299	-1.04
10	Solok Selatan	132093	133804	144281	8.36
11	Dharmasraya	180915	186354	191422	2.83
12	Pasaman Barat	333192	338567	365129	4.44
13	Padang	856815	875548	833562	-1.43
14	Solok	58473	59837	59396	0.80
15	Sawah Lunto	54307	54685	56866	2.27
16	Padang Panjang	54218	56491	47008	-7.99
17	Bukittinggi	106045	107805	111312	2.41
18	Payakumbuh	105994	106911	116825	4.68
19	Pariaman	70625	70726	79043	5.33
	Sumatera Barat	4763099	4827973	4846909	0.88

Sumber : BPS Sumbar 2008-2010 (data diolah 2012)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan ekonomi. PDRB menurut harga konstan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Tabel 6 akan dirinci Nilai

PDRB menurut Harga Konstan 2000 Propinsi Sumatera Barat Menurut kabupaten/kota.

Tabel 6
Nilai PDRB Atas Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2008-2010 (Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	LP Rata-Rata (%)
1	Kepulauan Mentawai	486.66	509.40	534.23	4.66
2	Pesisir Selatan	1899.03	2022.25	2107.97	5.28
3	Solok	1926.23	2047.06	2175.12	6.08
4	Sijunjung	1205.42	1271.64	1343.28	5.41
5	Tanah Datar	2331.74	2468.74	2614.19	5.72
6	Padang Pariaman	2645.12	2749.34	2890.75	4.42
7	Agam	2792.89	2929.87	3096.17	5.14
8	50 Kota	2545.80	2684.58	2846.15	5.56
9	Pasaman	1214.88	1289.26	1368.46	12.40
10	Solok Selatan	579.48	614.81	653.45	12.59
11	Dharmasraya	1020.08	1087.78	1158.56	6.37
12	Pasaman Barat	2394.93	2544.77	2702.34	6.04
13	Padang	10797.26	11345.64	12021.6	5.35
14	Solok	473.69	497.62	527.27	5.34
15	Sawah Lunto	474.38	494.71	519.6	4.54
16	Padang Panjang	373.25	396.83	420.84	6.01
17	Bukittinggi	918.91	969.59	1028.92	5.64
18	Payakumbuh	774.49	819.40	871.65	5.90
19	Pariaman	656.25	685.60	721.66	4.73
	Sumatera Barat	35510.49	37428.89	39602.21	5.45

Sumber : BPS Sumbar 2008-2010 (data diolah 2012)

Pada Tabel 6 terlihat PDRB Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2008 sampai 2010. Dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata pertahun propinsi PDRB propinsi mengalami peningkatan sebesar 5.45%. Laju pertumbuhan yang merata terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Dimana laju pertumbuhan berkisar antara 4.42% sampai dengan 6.37%. Tetapi hal ini tidak berlaku pada Kabupaten Pasaman dan Solok Selatan dimana laju pertumbuhan rata-rata kabupaten/kota ini secara berturut-turut sebesar 12.40% dan 12.59%.

Peningkatan yang tinggi pada kedua kabupaten ini kemungkinan karena peningkatan produksi barang dan jasa.

Sehubung dengan uraian–uraian di atas, maka penulis tertarik mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang Berjudul **”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 16 Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh penerimaan pajak mobil terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat ?
5. Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat ?

6. Sejauhmana pengaruh penerimaan pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh penerimaan pajak mobil terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.
5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.
6. Pengaruh penerimaan pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan peneliti.
3. Sebagai bahan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ekonomi pembangunan dan ekonomi publik.
4. Memberi sumbangan pemikiran dan implikasi kebijakan berdasarkan penelitian empiris atas fenomena bagi pemerintah daerah serta kepada SAMSAT/UPTD setempat selaku instansi terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Keuangan daerah menyangkut kepada Penerimaan Asli Daerah dan pemberian dari pemerintah pusat serta sumber lainnya sebagai penerimaan daerah. Keuangan daerah adalah alat fiskal bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilisasi hasil pembangunan daerah yang semakin penting karena pemerintah pusat tidak dapat memikul semua dana pembangunan daerah. (Sidin, 2001: 12).

Undang–undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengelolaan daerah lebih dititik beratkan pada daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Daerah Propinsi adalah Daerah otonom sekaligus daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Propinsi bukan merupakan daerah atasan kabupaten atau daerah kota. Jadi antara Daerah Otonom Propinsi dengan daerah otonom kabupaten atau daerah otonom kota tidak memiliki hubungan yang hierarki.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Bahwa penerimaan daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisah.
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan terdiri dari
 1. Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain- lain penerimaan yang sah

Setelah itu menurut pembagiannya pendapatan daerah diatur dalam Undang-undang tentang pajak daerah, yaitu Undang-undang No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah, dimana menurut jenis-jenisnya dibagi kepada pendapatan daerah untuk propinsi dan pendapatan daerah untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

Pajak daerah untuk propinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan di atas air
- e. Pajak air permukaan

Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restouran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan, maka Pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar tiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali setiap potensi yang ada di daerahnya, baik itu potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun potensi Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu pemerintah dituntut untuk adil dalam menentukan proses pembangunan. Nilai keadilan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dimaknai dengan adanya kesamaan jumlah barang dan jumlah

jasa yang didapat, memiliki utilitas yang sesuai dengan masing-masing usaha yang mencapai kepuasan maksimum masing-masing warga negara (Pratama, 1999).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mardiasmo (2002:125) mengemukakan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Definisi Pendapatan Asli Daerah dikemukakan oleh Widjaja. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah,serta pinjaman lainnya. (Widjaja, 2002:110)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengaruh Penerimaan Pajak Mobil Terhadap PAD

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005:7).

Menurut Djayadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kajadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Tanjung, 2003:1).

Jadi pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan tetapi tidak sebagai hukuman yang diatur menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Waluyo (2008:11) berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, memperlihatkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, terlihat dengan dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Waluyo (2008:12), mengemukakan macam pajak yang dibedakan berdasarkan golongan, yaitu :

- 1) *Pajak langsung*, merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi juga harus menjadi beban langsung Wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan.
- 2) *Pajak tidak langsung*, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai.

Dari dua macam pajak berdasarkan golongan, dapat diketahui pajak langsung, beban pajak menjadi tanggung jawab penuh wajib pajak untuk melunasinya. Sedangkan pada pajak tidak langsung penarikan atas pajak dapat digeser kepada pihak lain, misalnya pada pajak barang mewah, beban pajak dialihkan dari produsen/penjual kepada pembeli/konsumen.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang terdapat pada teori tersebut yaitu :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayarannya, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan apabila penerimaan mengalami surplus maka kelebihanannya akan digunakan untuk *publik investrment*, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan, baik negara maupun daerah.
- 5) Selain fungsi *budgeter* (penerimaan), pajak juga memiliki fungsi mengatur.

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2002:25-26) bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan.

Analisis penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam mengalokasikan target, sehingga hasil yang diterima berupa realisasi akan benar-benar optimal. Potensi adalah batas maksimal PKB yang seharusnya dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Dalam Undang-undang ini juga dimuat mengenai pengertian objek dan Subyek PKB.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. (Siahaan, 2005:137)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat besar yang bergerak (Prakorso, 2003).

Pajak kendaraan Bermotor merupakan pajak langsung. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak langsung menurut Soemitro yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit surat pemberitahuan/SPT pajak atau KOHIR yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan lain sebagainya (Indra, 2010).

Dengan demikian dapat disimpulkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak langsung, dan dikenakan atas kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan bertujuan sebagai sarana angkutan orang atau barang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PKB merupakan salah satu bagian Pajak Daerah dan Dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang disahkan.

Dalam penelitian ini, jenis pajak kendaraan bermotor yang akan diteliti hanya kendaraan bermotor jenis mobil, sesuai dengan pengelompokan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Daerah Propinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam kategori mobil dalam hal ini ialah sedan, jeep, m.bus, micro bus, bus, pick up, l.Truck dan truck.

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Menurut Undang-undang no 34 tahun 2000. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Novitasari, 2011 : 8).

Jenis-jenis retribusi daerah menurut (Kurniawan, 2010 : 35) adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi parkir ditepi jalan umum

- 6) Retribusi pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Tujuan Retribusi Daerah menurut (Mardiasmo : 2002) pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.

Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

- 1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- 2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab VI Pasal 108 mengatur tentang Objek Retribusi. Bahwa Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. (Novitasari, 2011 : 9).

Sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 157 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari :

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dapat disimpulkan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

c. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2004:68), "Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: “1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi”

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang di pisahkan antara lain bagi laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan milik daerah dan hasil mengelola kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan “Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Sedangkan menurut Halim (2004 : 68) menyebutkan Pengelolaan Kekayaan Milik Derah yang Dipisahkan adalah Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Jadi dapat disimpulkan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam pengertiannya penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap di dalam suatu wilayah, penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian, dalam konteks pasar ia berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Dalam

konteks pembangunan pandangan penduduk terpecah dua ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan (Dumairi, 2004: 68)

Todaro (2000: 281) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah, melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang berdampak positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik Negara maju maupun Negara berkembang.

Hal senada dikatakan oleh Sadono dan Sukirno (2001: 426) yang menyatakan penduduk adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan jumlah barang-barang konsumsi di pasar dan akhirnya terjadi perluasan pasar. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga mengakibatkan adanya perluasan usaha. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat. Dengan adanya kecendrungan peningkatan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Adam Smith dalam Santosa dan Rahayu (2005 : 14), menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan

penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat (Santosa dan Rahayu, 2005 :15).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Budihardjo dalam Santosa dan Rahayu 2005 : 15).

Jadi dari teori dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah karena dengan meningkatnya jumlah penduduk maka tingkat produksi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Setiap negara di dunia sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi. Kuznets (dalam Jhingan 2004:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi

kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini memiliki tiga komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu daerah sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003:16), PDRB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, pendapatan total yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua, adalah pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian.

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; tahapan masyarakat tradisional, penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan, tahapan tinggal landas,

tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal yang tinggi, Todaro dan Smith (2004:129). Untuk menuju tahap “tinggal landas” Rostow mensyaratkan adanya tabungan dan investasi 15-20 persen dari GNP-nya, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang menabung dari proporsi tersebut, Todaro dan Smith (2004:132).

Formula untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004:18), yaitu:

$$G_t = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100 \% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

G_t = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

Y_{rt} = Pendapatan perkapita pada tahun t

Y_{rt-1} = pendapatan per kapita pada tahun t-1

Dilihat dari pengertiannya pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya

akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2002)

Menurut Nanga (2001:279) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP), atau pendapatan atau output perkapita.

Menurut Sukirno (2001:10) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi meningkat dan kemakmuran masyarakat juga meningkat.

Menurut Tulus Tambunan (2001:4) mengartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2001: 456)

jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dan peningkatan pertumbuhan perekonomian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu keharusan dalam peningkatan pembangunan serta PDRB menurut harga konstan merupakan indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi.

B. Penelitian Sejenis

Hasil penelitian sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Dibawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang menghasilkan beberapa kesimpulan terkait:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Efni hidayat (2009), ia membahas Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yanne Yulfiza pada tahun 2010, yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat, Dari hasil penelitian diperoleh peranan pajak hiburan berpengaruh cukup besar terhadap PAD.
3. Muhammad Riduansyah (2003). Penelitian membahas tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor. perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu tahun Anggaran 1993/1994- 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% pertahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Bogor tercermin dari APBD-nya. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu 1993/1994-2000 rata-rata

pertumbuhannya sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama memberikan kontribusi pertahun rata-ratanya sebesar 15.61%

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini digunakan pajak mobil yang merupakan sumber terbesar penerimaan pajak dari pajak daerah di Propinsi Sumatera Barat selain itu juga digunakan retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebasnya dan variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah. sedangkan daerah penelitian yang digunakan adalah Propinsi Sumatera Barat yang dipisahkan menurut kabupaten dan kotanya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari kajian teori yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) dipengaruhi oleh variable bebas Penerimaan Pajak Mobil (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3), Jumlah penduduk (X_4), dan Pertumbuhan ekonomi (X_5).

Penerimaan pajak mobil sebagai variabel bebas (X_1) berhubungan positif dengan pendapatan asli daerah selaku variabel terikat (Y), semakin tinggi penerimaan pajak

mobil maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah demikian sebaliknya, semakin rendah penerimaan pajak mobil maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah.

Demikian juga dengan retribusi daerah (X_2) berhubungan positif dengan pendapatan asli daerah (Y) semakin tinggi retribusi daerah maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan, dan apabila terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah semakin rendah pula pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) juga berhubungan positif dengan pendapatan asli daerah (Y). semakin tinggi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan, dan begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah.

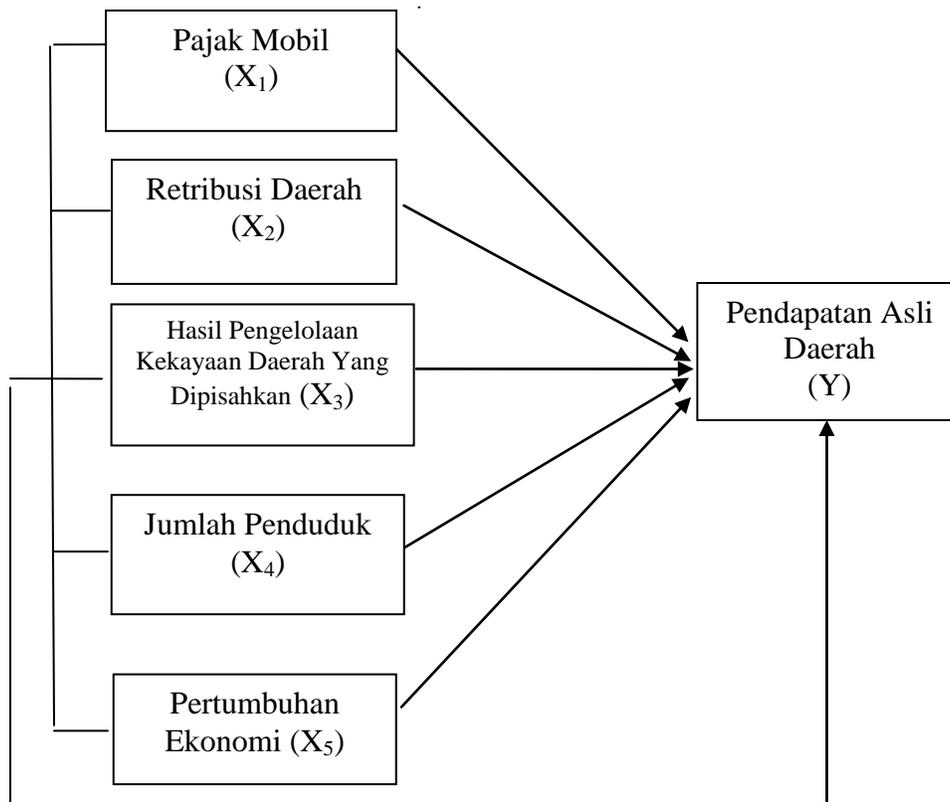
Jumlah penduduk (X_4) berhubungan positif terhadap pendapatan asli daerah (Y) semakin tinggi jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan, hal sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi (X_5) berhubungan positif dengan pendapatan asli daerah (Y) semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan, hal sebaliknya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan

Kelima variabel bebas di atas yaitu penerimaan pajak mobil (X_1), retribusi daerah (X_2), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), Jumlah

penduduk (X_4) dan pertumbuhan ekonomi (X_5) juga akan diteliti secara bersama-sama untuk melihat pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual penelitian ini adalah :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerimaan pajak mobil terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_5 \neq 0$$

6. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi parsial} \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak mobil berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2008-2010, Pajak mobil meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat, dengan besar pengaruhnya adalah 0,285 persen, dengan asumsi *ceteris paribus*.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2008-2010, retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat sebesar 0,363 persen, dengan asumsi *ceteris paribus*.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah probabilitas $0,000 < 0,05$ dengan tingkat pengaruh sebesar 0,318 persen, dengan asumsi *ceteris paribus*.
4. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah probabilitas $0,0472 < 0,05$ dengan tingkat pengaruhnya sebesar 0,051 persen. Artinya peningkatan 1 persen jumlah penduduk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,051 persen, dengan asumsi *ceteris paribus*.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Dimana didapat probabilitas $0,422 > 0,05$, artinya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat, dengan asumsi *ceteris paribus*.
6. Pajak mobil, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 91,43 persen

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak mobil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, disarankan kepada pemerintah untuk lebih mengintensifkan pemungutan pajak mobil, agar laju penerimaan pendapatan asli daerah bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.
2. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat, diharapkan pemerintah tetap meningkatkan prasarana pendukung, sehingga penerimaan retribusi dapat meningkat.
3. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat, diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana infrastruktur, karena semakin baiknya kondisi sarana dan prasarana infrastruktur maka mobilitas kegiatan pengelolaan kekayaan daerah juga akan semakin lancar, sehingga hal tersebut juga akan dapat meningkatkan laju pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat.
4. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan

pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan sehingga nanti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga hal ini mampu meningkatkan laju pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat

5. Dengan tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat, diharapkan usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan infrastruktur, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut akan memberikan alternatif penting bagi peningkatan pendapatan asli daerah di masa mendatang.
6. Pada penelitian ini masih banyak variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu adanya penelitian lanjutan sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah Propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika (BPS). 2008-2010. *Statistik Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera barat*. BPS: Padang.
- Dumairi, 2004 *Perekonomian Indonesia* :Erlangga. Jakarta.
- Gujarati, Damodar. (2006). “*Ekonometrika Dasar*”: Erlangga. Jakarta.
- Hendra, Hafrizal, 2001, “*Penggalian Potensi Pendapatan Daerah*” Workshop Managemen Strategik dan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah : Kerjasama SIAGA Projeck UGM dengan PSKD Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Halim, Abdul 2004. *Manajemen keuangan daerah*,: UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hidayat 2009, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Utara*.: Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Irianto. 2004. *Statistic Konsep Dasar dan Aplikasinya*.: Kencana, Jakarta.
- Linda, Ernawati, 2002 “*Analisa Potensi dan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Propinsi Riau*”.Jurusan Ilmu Ekonomi.: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Mangkoesotbroto, Guritno (2001). *Ekonomi public*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.: Andi, Yogyakarta.
- Michael P.Todaro (2000). *Pembangunan ekonomi*,: Erlangga. Jakarta.
- Novitasari, Dian. (2011). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal*. : Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi. Universitas Pancasakti., Tegal
- Prakorso, Bambang. 2003. *Pajak Retribusi Daerah*.: UII Press, Yogyakarta
- Pratama, Rhahardja dan Mandala Manurung. 1999. *Teori Ekonomi Mikro*.: LP-FEUI, Jakarta.